



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Minta Segera Tetapkan Tersangka

BENTENG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng) tak kunjung menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penyusunan kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2013 dan 2014. Presidium pemekaran Kabupaten Benteng, Junia Heri mendesak Kejari Benteng untuk segera menetapkan tersangka kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan Juli 2021 lalu itu. Sehingga orang yang terlibat dalam kasus ini bisa dimintai pertanggungjawabannya. Sebab tindakan korupsi jika dibiarkan bisa menghancurkan Kabupaten Benteng.

"Bagaimana mau berkembang dan maju Kabupaten Benteng ini apabila oknum-oknum pejabat yang merugikan negara, merugikan Kabupaten Benteng masih berkeliaran. Jadi kami berharap kepada Kejari Benteng untuk benar-benar membasmi segala bentuk korupsi di Benteng ini, tidak hanya kasus RDTR, termasuk kasus dugaan korupsi yang lainnya," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Direktur Esekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu Melyansori. Dia menyebutkan, apabila suatu kasus sudah baik ke tingkat penyidikan, biasanya tidak lama lagi akan ada penetapan tersangka. Namun saat ini sudah tujuh bulan lebih semenjak kasus ini dinaikan ke tingkat penyidikan namun belum juga ada penetapan tersangka.

"Dengan situasi seperti ini jelas kita mempertanyakan kinerja dari Kejari Benteng. Mengapa kasus sangat lambat sekali dan ada apa sebenarnya. Pertanyaan ini wajar dilontarkan semua warga Benteng, karena kasus ini hingga saat ini tidak ada kejelasan men-

genai tersangkanya," tegasnya

Dia menambahkan, semua warga Benteng dan khusus Puskaki menanti Kejari Benteng menetapkan tersangka dari kasus ini. "Pengusutan kasus ini sudah sangat lama dilakukan dan saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Kami berharap dan meminta kepada Kejari Benteng untuk segera menetapkan tersangka dari kasus ini biar semuanya jelas dan siapa dalang dari dugaan korupsi RDTR tahun 2013 dan 2014 di Kabupaten Benteng," demikian Melyansori.

Di tempat terpisah Kepala Kejari Benteng, Tri Widodo, SH, MH melalui Kasi Intel Kejari Benteng, Septeddy Endra Wijaya, SH, MH mengungkapkan, untuk perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi RDTR tahun 2013 dan 2014, mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap para saksi yang terlibat. Pemanggilan saksi untuk mengumpulkan semua data dan bukti agar kasus ini bisa terang dan jelas.

"Kalau untuk total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 11 orang, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Edy Hermansyah. Untuk Sekda Benteng sendiri, Kejari

sudah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali. Termasuk juga mantan Sekda Benteng, berinisial DY, bendahara pengeluaran dan beberapa ASN di lingkungan Pemkab Benteng," jelasnya.

Selain sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Benteng, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang pejabat dari Kementerian ATR/BPN. Mengenai kerugian negara, masih menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Anggaran kegiatan RDTR ini memakan anggaran yang mencapai Rp 647 juta. Anggaran Rp 647 juta tersebut terdiri dari anggaran tahun 2013 senilai Rp 317 juta dan anggaran tahun 2014 senilai Rp 330 juta.

"Dugaan fiktif ini diawali karena adanya laporan yang disampaikan atau dilaporkan oleh salah seorang masyarakat Benteng kepada Kejari Benteng. Setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian langsung melakukan tindak lanjut dengan memanggil pihak terkait untuk mendapatkan keterangan," demikian Teddy. (jee)